

**MALPRAKTIK PENDAFTARAN CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

TESIS



**OLEH:
VIKO DARMA
BP : 1720862029**

**PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

MALPRAKTIK PENDAFTARAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Oleh : Viko Darma (1720862029)

Dibawah bimbingan : Prof. Dr. rer. Soz. Nursyirwan Effendi dan Dr. Khairul
Fahmi,SH,MH

ABSTRAK

Salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Tahapan Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimulai dari pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Malpraktik pemilu yang terjadi pada tahapan pendaftaran calon seringkali menyebabkan terjadinya sengketa di Bawaslu, Peradilan Tata Usaha Negara, bahkan Mahkamah Konstitusi yang tentunya mereduksi kualitas pemilu itu sendiri, walaupun tersedia mekanisme kelembagaan yang diatur dalam Undang-Undang, namun hal tersebut akan sangat melelahkan dan mengganggu jalannya proses demokrasi serta mencederai integritas pemilu. Pada Proses pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Solok untuk Pemilu Tahun 2019 salah satu bakal calon yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Solok dalam Daftar Calon Sementara (DCS) diduga melakukan manipulasi dokumen persyaratan calon yaitu manipulasi Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri Solok dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Hal ini diketahui setelah ada tanggapan masyarakat terhadap pengumuman DCS yang disampaikan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok. Bawaslu Kabupaten Solok menindaklanjuti dengan mengirimkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Solok untuk dilakukan klarifikasi. Perlu diketahui bahwa salah satu syarat kandidasi pendaftaran bakal calon legislatif adalah bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan bukan mantan terpidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berbasis pada studi kasus. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis terjadinya malpraktik pemilu pada proses pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Solok, seperti siapa aktor yang terlibat, bagaimana malpraktik pemilu dilakukan dan implikasinya. Ada 3 tipologi malpraktik pemilu yang dikemukakan oleh Sara Birch salah satunya adalah adanya manipulasi kerangka hukum pemilu yang kemudian dijabarkan lebih luas oleh Surbakti yaitu adanya manipulasi kelayakan peserta pemilu atau kandidat. Dari hasil penelitian bagaimana malpraktik pemilu dilakukan oleh bakal calon dalam melengkapi syarat surat keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri Solok, serta hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Solok, hingga pada akhirnya KPU Kabupaten Solok tidak menetapkan bakal calon yang bersangkutan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Solok untuk Pemilu Tahun 2019.

Kata kunci: Malpraktik Pemilu, Daftar Calon Sementara (DCS), Daftar Calon Tetap (DCT)

MALPRACTIC FOR REGISTRATION OF PROSPECTIVE MEMBERS OF THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL OF SOLOK DISTRICT IN THE 2019 GENERAL ELECTION

By : Viko Darma (1720862029)

Supervised by : Prof. Dr. rer. Soz. Nursyirwan Effendi dan Dr. Khairul Fahmi, SH, MH

ABSTRACT

One of the stages of holding the 2019 Concurrent Election as stipulated in KPU Regulation Number 5 of 2018 concerning the Stages, Programs and Schedule for the Implementation of the 2019 General Election is the Nomination of Members of the People's Representative Council (DPR), Provincial Regional People's Representative Council (DPRD) and the People's Representative Council. Regional (DPRD) Regency / City. The stages for nominating members of DPR and Provincial DPRD and Regency / Municipal DPRD begin with the registration and verification of candidates for members of DPR and Provincial DPRD and Regency / Municipal DPRD. Election malpractice that occurs at the candidate registration stage often causes disputes in Bawaslu, the State Administrative Court and even the Constitutional Court which of course reduces the quality of the election itself, even though there are institutional mechanisms regulated in the Law, this will be very tiring and disrupt the course of action. democratic process. In the process of registering candidates for DPRD members of the Solok Regency for the 2019 Election where one of the candidates who had been appointed by the KPU of Solok Regency in the Provisional Candidate List (DCS) was suspected of manipulating the candidate's required documents, namely manipulating a certificate of never being sentenced to imprisonment from the Solok District Court and Police Record Certificate (SKCK) from the Solok Kota Police Station. This is known after the public's response to the DCS announcement was conveyed through the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Solok Regency. Solok Regency Bawaslu followed up by sending a letter of recommendation to the Solok Regency KPU for clarification. This study uses a qualitative descriptive research method based on case studies. The purpose of this study is to analyze the occurrence of election malpractice in the registration process of candidates for DPRD Solok Regency, such as who the actors are involved, how election malpractice is carried out and its implications. There are 3 typologies of election malpractice, one of which is the manipulation of the electoral legal framework, including the manipulation of the eligibility of election participants or candidates. From the results of research on how election malpractice was carried out by prospective candidates in completing the requirements of a certificate of never being sentenced to prison from the Solok District Court and a Police Record Certificate (SKCK) from the Solok Kota Police Resort, as well as the clarification made by the KPU of Solok Regency, until finally The KPU of Solok Regency did not determine the prospective candidates concerned in the Permanent Candidate List (DCT) for DPRD Members of the Solok Regency for the 2019 Election.

Key words : Electoral Malpractice Nomination Of Candidate, Provisional List of Candidates (DCS), List of Permanent Candidates (DCT)

HALAMAN PENGESAHAN

MALPRAKTIK PENDAFTARAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

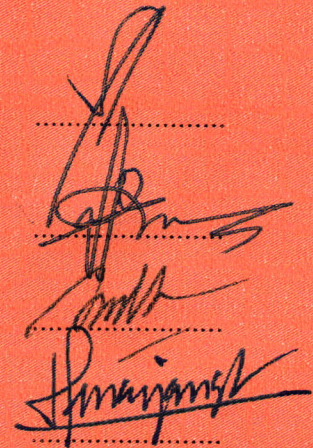
NAMA : VIKO DARMA
No. BP : 1720862029

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Kelayakan Tesis
Program Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas

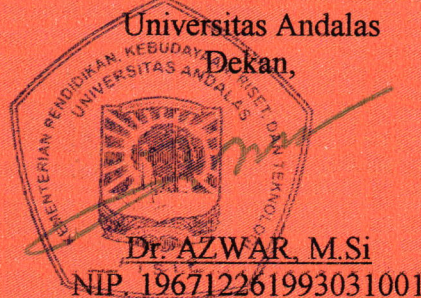
Tanggal: 27 Agustus 2021

DEWAN PENGUJI

Dr. Syahrizal, M.Si	Penguji
Dr. Ria Ariany, M.Si	Penguji
Dr. Indah Adi Putri, M.IP	Penguji
Prof. Dr. rer. Soz. Nursyirwan Effendi	Pembimbing I
Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	Pembimbing II



Padang, 27 Agustus 2021
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas

Dekan,

Dr. AZWAR, M.Si
NIP. 196712261993031001